



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS DEI OLEH PT PERTAMINA PATRA NIAGA INTEGRATED TERMINAL SEMARANG

Cantika Caramina Gusma¹, Heni Indrayani², Luthfi Nurwafi F³

^{1,2}Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, Indonesia

³PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Semarang, Indonesia
cancraga@gmail.com

Abstract

Social inequality in the coastal community of Tanjungmas Village, North Semarang, remains a significant issue encompassing environmental, economic, social, educational, and health aspects, including cases of domestic and gender-based violence. In response to these challenges, corporations are expected to implement social responsibility programs that go beyond financial objectives and address community needs. This study aims to analyze the implementation of a Diversity, Equity, and Inclusion (DEI)-based Community Engagement program at the Integrated Terminal of PT Pertamina Patra Niaga and examine community perceptions of the program. This research employed a qualitative case study approach, using in-depth interviews with community leaders, volunteers, government representatives, and company officers, as well as document analysis. The findings indicate that the Lawang Cemoro program applies DEI principles by involving diverse community groups, particularly vulnerable populations, and improving access to social and economic services. Community Engagement is reflected in three key aspects: content (capacity-building and rights-based training programs), sources (collaboration among community members, local government, and the company), and process (program planning, publication through mass media and social media, implementation of community development programs, sustainability reporting). The program also contributes to the achievement of Sustainable Development Goals. This study highlights the importance of integrating Diversity, Equity, and Inclusion principles into Community Engagement strategies to foster inclusive and sustainable community empowerment.

Keywords: Community Empowerment; Community Engagement; DEI; Sustainability; Vulnerable Groups

Abstrak

Ketidaksetaraan sosial di komunitas pesisir Desa Tanjungmas, Semarang Utara, masih menjadi isu signifikan yang mencakup aspek lingkungan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender. Menanggapi tantangan ini, perusahaan diharapkan untuk menerapkan program tanggung jawab sosial yang melampaui tujuan finansial dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program keterlibatan Masyarakat berbasis Keberagaman, Kesenjangan, dan Inklusi di PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal dan meneliti persepsi masyarakat terhadap program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, dengan menggunakan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, relawan, perwakilan pemerintah, dan pejabat perusahaan, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Lawang Cemoro menerapkan prinsip-prinsip DEI dengan melibatkan beragam kelompok masyarakat, khususnya populasi rentan, dan meningkatkan akses terhadap layanan sosial dan ekonomi. Keterlibatan masyarakat tercermin dalam tiga aspek utama: konten (program pelatihan peningkatan kapasitas dan berbasis hak), sumber (kolaborasi antar anggota masyarakat, pemerintah daerah, dan perusahaan), dan proses (perencanaan program, publikasi melalui media massa dan media sosial, implementasi program pengembangan masyarakat, pelaporan keberlanjutan). Program ini juga

berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Studi ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip keberagaman, kesetaraan, dan inklusi ke dalam keterlibatan masyarakat untuk mendorong pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: DEI; Keberlanjutan; Kelompok Rentan; Keterlibatan Masyarakat; Pemberdayaan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Alwi & Mutmainnah (2025) menjelaskan bahwa kesenjangan sosial merupakan kondisi ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi tersebut muncul akibat tidak meratanya akses terhadap sumber daya yang tersedia serta kebijakan yang kurang adil, sebagaimana dikemukakan oleh Ali et al (2025). Ketimpangan sosial yang terjadi di kawasan pesisir Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara, hingga kini masih menjadi tantangan multidimensi yang mencakup aspek lingkungan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Persoalan seperti pencemaran lingkungan di kelurahan Tanjung Mas dimana para warga hidup dikelilingi lingkungan yang penuh sampah masih banyak yang diabaikan.

Kondisi permukiman kumuh dan pencemaran lingkungan di Kelurahan Tanjung Mas bukan hanya menimbulkan persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan masalah sosial ekonomi yang lebih luas. Ancaman kondisi lingkungan dan ekonomi yang tidak terselesaikan ini kemudian berdampak pada stabilitas mental masyarakat yang memburuk, menurut data yang diperoleh dari tokoh masyarakat setempat, dari tahun 2022 hingga 2025 terdapat 14

kasus yang telah terjadi di kelurahan Tanjung Mas, meliputi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), kekerasan seksual, kekerasan hak asuh anak, dan kehamilan di usia dini atau di luar nikah menunjukkan bahwa sebagian kelompok masyarakat, terutama perempuan, anak, dan lansia, berada dalam kondisi yang semakin rentan. Kompleksitas permasalahan tersebut menegaskan perlunya pendekatan pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya adaptif, tetapi juga inklusif dan berkeadilan, serta melibatkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, komunitas, dan sektor korporasi.

Permasalahan ini dapat dikaji melalui konsep DEI (Diversity, Equity, Inclusion) atau Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi yang bertujuan membangun lingkungan yang adil dan inklusif. Konsep DEI menjadi salah satu fokus penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat sebagai respons terhadap tantangan dan kesenjangan sosial yang semakin kompleks. Persoalan tersebut juga tampak nyata pada masyarakat pesisir di lingkungan masyarakat pesisir, khususnya di wilayah kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara. Dalam aspek keberagaman, masyarakat Tanjung Mas menunjukkan kondisi yang beragam baik dari latar belakang sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Dari

aspek kesetaraan, permasalahan terlihat dari kurang meratanya akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, serta peluang ekonomi, terutama bagi keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah dan kelompok rentan, serta aspek inklusi yang tercermin dari permasalahan masih terbatasnya perhatian serta rendahnya partisipasi sebagian warga dalam berbagai kegiatan pemberdayaan di lingkungan tempat tinggal mereka.

Dalam konteks tersebut, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat memerlukan strategi komunikasi yang terencana agar tujuan program dapat dipahami dan diterima secara efektif oleh masyarakat sasaran. Suryanto & Suaib (2024) menjelaskan bahwa sebelum merancang strategi komunikasi, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan, yaitu menentukan komunikator dengan mempertimbangkan daya tarik serta kredibilitas sumber, menetapkan sasaran komunikasi dan menganalisis kebutuhan khalayak, menyusun pesan, serta memilih media dan saluran komunikasi. Program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu sarana edukasi dan pendampingan yang diperlukan untuk mendorong perubahan sosial serta perbaikan kondisi hidup masyarakat. Gunawan et al. (2023) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk memberikan daya

atau penguatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peran program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menjadi penting dalam proses pemberdayaan. Fauziah et al. (2024) menyatakan bahwa program TJSL dapat menjadi salah satu pendekatan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan menjadi salah satu yang diperlukan untuk sarana edukasi dan pendampingan untuk mendorong perubahan sosial serta perbaikan kondisi hidup masyarakat. Keberhasilan program CSR tidak hanya bergantung pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi, perusahaan tidak hanya menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, tetapi juga memahami kebutuhan, harapan, dan aspirasi para stakeholder (Fransisca & Juliadi, 2024).

Dalam konteks tersebut, korporasi memiliki peran untuk menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan berlandaskan prinsip 3P (*Profit, People, Planet*). Pakpahan (2024, dalam Fauziah et al., 2024) menyatakan bahwa program TJSL tidak hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pelaksanaan CSR saat ini menjadi instrumen penting bagi perusahaan untuk menciptakan nilai bersama, memperkuat legitimasi sosial, serta merespons berbagai dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan terhadap lingkungan dan

masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Muzakynur (2021, dalam Pharmacista, 2023). Pelaksanaan CSR yang efektif dapat membentuk persepsi positif masyarakat terhadap perusahaan. Citra organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh produk atau layanan yang dihasilkan, tetapi juga oleh bagaimana perusahaan mengomunikasikan dan melaksanakan program-program sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat (Rahmawati & Andriani, 2023)

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat (2) tentang Perseroan Terbatas di Indonesia, bahwa “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” (Database Peraturan BPK RI, 2007). Program TJSL juga menjadi media pelaksana pembangunan berkelanjutan, hal ini dicanangkan oleh organisasi United Nation (UN) yang menuntut keterlibatan aktif setiap perusahaan dalam mendukung pencapaian 17 target pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan TJSL sebagai bentuk upaya perusahaan dalam memberdayakan masyarakat memerlukan tiga prinsip utama, yaitu; 1). Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat, 2). Pengembangan

masyarakat, dan 3). Pemberdayaan masyarakat (Mardikanto, 2009; Sidik & Nabilah, 2024). Dalam menyusun program untuk membangun hubungan dengan para stakeholder, terdapat dua aspek utama yang perlu diperhatikan. Pertama, program komunikasi harus relevan dengan kebutuhan stakeholder. Kedua, stakeholder perlu dilibatkan secara aktif dalam aktivitas hubungan masyarakat. Kedua aspek tersebut tidak hanya bersifat retorik atau berorientasi pada komunikasi satu arah, tetapi juga menempatkan stakeholder sebagai bagian dari strategi komunikasi sekaligus mitra kolaboratif dalam pelaksanaan program (Indrayani et al., 2025).

Melalui kerja sama multipihak, perusahaan tidak hanya memperluas dampak sosial program, tetapi juga memperkuat legitimasi, kepercayaan publik, serta keberlanjutan hubungan dengan masyarakat sebagai bagian dari strategi pemberdayaan yang inklusif (Indrayani et al., 2025). Perspektif tersebut sejalan dengan teori *stakeholder* yang dikemukakan oleh Freeman (1984), yang menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh hubungan dengan pemegang saham, tetapi juga oleh kemampuannya dalam mengelola hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat memengaruhi maupun dipengaruhi oleh aktivitas organisasi. Dalam konteks tanggung jawab sosial

perusahaan, teori *stakeholder* menegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya serta menciptakan manfaat jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan (Tufani, 2024).

PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Semarang merespons kondisi tersebut melalui pelaksanaan Program TJSL “Lawang Cemoro”, berdasarkan dokumen lingkup pekerjaan program TJSL PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Semarang, program “Lawang Cemoro” dirancang sebagai upaya kolaboratif untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan kelompok rentan di kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang. Program ini memiliki makna sebagai pintu harapan bagi masyarakat Semarang Utara. terbagi atas beberapa fokus kegiatan pemberdayaan, diantaranya yaitu Manfaati Sampah, Tirta Migunani, Sehat Jiwa Raga, dan Pasinaon. Diinisiasi sejak 2022, program “Lawang Cemoro” dilatarbelakangi oleh kondisi pencemaran lingkungan sehingga menyebabkan dampak-dampak yang mengancam ketahanan masyarakat seperti gizi buruk, kerentanan pada ibu hamil, tekanan ekonomi, minimnya kesadaran akan kesehatan fisik dan mental, hingga kekerasan dalam rumah tangga, hal ini semakin

menuntut program pemberdayaan yang dilakukan menjadi lebih inklusif.

Namun demikian, mayoritas penelitian terdahulu masih berfokus pada implementasi konsep DEI yang diimplementasikan untuk budaya organisasi atau perusahaan, lingkungan pekerjaan, maupun program CSR atau community engagement yang masih diimplementasikan secara umum. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan perspektif DEI dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis CSR khususnya pada masyarakat yang tinggal di pesisir dan kelompok rentan sejauh ini masih terbatas

Berdasarkan urgensi dan konteks tersebut, melalui dimensi keterlibatan masyarakat konsep DEI, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana implementasi program dalam memperluas partisipasi masyarakat, membuka ruang dialog yang lebih inklusif, serta mendorong masyarakat, terutama kelompok rentan bisa menjadi penggerak dalam transformasi sosial di lingkungan mereka. Penelitian ini juga menelaah persepsi warga terhadap dampak program dalam meningkatkan inklusi & pemberdayaan sosial masyarakat. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi pengembangan program TJSL dengan konsep DEI yang lebih adaptif & inklusif pada konteks pemberdayaan sosial.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas kajian community engagement dengan mengintegrasikan perspektif Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) dalam analisis program CSR berbasis pemberdayaan masyarakat. Secara empiris, penelitian ini memberikan bukti mengenai implementasi DEI dalam konteks masyarakat di lingkungan pesisir yang selama ini masih relatif terbatas dibahas dalam literatur komunikasi dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sari, (2023, dalam Yurmaini et al., 2024) menjelaskan bahwa penelitian studi kasus berfokus pada pengkajian intensif terhadap kasus yang dipilih secara purposif, memanfaatkan beragam sumber data, termasuk wawancara, observasi, dokumen, serta artefak serta menelusuri fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik sampling non-probabilitas *purposive sampling*, yakni pemilihan sumber data yang didasarkan pada kriteria atau pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Objek penelitian adalah Program “Lawang Cemoro” PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Semarang Berbasis DEI untuk pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada audio dan

video visual, pendapat dan tanggapan, foto, dokumen, dan hasil analisis wawancara mengenai materi penelitian.

Data primer didapatkan dari narasumber berupa tanggapan langsung melalui proses wawancara dengan 7 informan yakni tokoh masyarakat atau kader (SAPA & L SAPA, JPPA (Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak), komunitas ASN Mengajar, Yayasan Anantaka kelompok wanita tani tunas bahagia, pegawai pengembangan masyarakat PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Semarang, dan Lurah Kelurahan Tanjung Mas. Data sekunder didapat dari dokumen perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Semarang, referensi jurnal, dan pemberitaan. Dokumentasi lain seperti laporan perusahaan, foto kegiatan, dan catatan program digunakan sebagai data pendukung. Pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen akan dianalisis menjadi deskriptif induktif yang berfokus pada pemaknaan data atau fenomena yang diamati serta menyajikan penjelasan tersebut disertai bukti pendukung. Penarikan kesimpulan peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan memadukan observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi untuk memperdalam pemahaman peneliti terhadap fenomena dan menghasilkan temuan data yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Konsep DEI

Implementasi program TJSL PT Pertamina di Kelurahan Tanjung Mas dapat dianalisis dan dipahami melalui konsep sebagai pendekatan sosial dan etis yang bertujuan menciptakan keberagaman sekaligus memastikan partisipasi yang adil dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat (Omar & Semhar, 2023). Sejalan dengan itu, temuan penelitian memperlihatkan bahwa konsep keberagaman tercermin dari jangkauan program yang melibatkan kelompok masyarakat dengan latar belakang sosial dan demografis yang beragam, sejalan dengan pandangan bahwa diversity menekankan pengakuan terhadap perbedaan identitas individu maupun kelompok sosial sebagai unsur penting dalam keberlanjutan komunitas (Tovar, 2023; Omar & Semhar, 2023).

Pada konsep kesetaraan, implementasi program terlihat melalui pemberian akses layanan dan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran. Praktik tersebut mencerminkan makna equity yang oleh Frederick dan Hemema (2019, dalam Adeoye et al., 2024) dipahami sebagai penyediaan dukungan agar setiap individu memperoleh kesempatan berkembang secara optimal.

Sementara itu, konsep inklusi tampak dari tersedianya ruang partisipasi masyarakat

dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa inklusi tidak hanya berkaitan dengan keberadaan berbagai kelompok dalam program, tetapi juga dengan terciptanya sistem yang memungkinkan partisipasi aktif dan bermakna dari seluruh pihak. (Novrianzah & Andrias, 2025)

Konsep Keberagaman

Konsep keberagaman dalam pelaksanaan Program Lawang Cemoro tercermin dalam keterlibatan anggota masyarakat dengan latar belakang sosial, ekonomi, usia, dan profesi yang beragam. Program ini menjangkau berbagai kelompok masyarakat dengan karakteristik sosial yang beragam, termasuk perempuan, anak-anak, remaja, lansia, dan keluarga dari latar belakang sosial ekonomi menengah ke bawah yang sering menghadapi keterbatasan struktural dalam mengakses layanan sosial dan peluang pengembangan masyarakat. Berdasarkan temuan wawancara, beberapa kelompok berbasis masyarakat aktif berpartisipasi dalam program ini, seperti Kelompok Petani Wanita Tunas Bahagia (Kelompok Wanita Tani/KWT), kader PKK, relawan dari Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA), Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA), Gerakan Pria untuk Perlindungan Perempuan dan Anak (LSAPA), dan komunitas pendidikan seperti ASN

Mengajar. Anggota kelompok-kelompok ini berasal dari berbagai kelompok usia dan latar belakang pekerjaan, termasuk ibu rumah tangga, pekerja informal, nelayan, karyawan sektor swasta, dan buruh harian, sementara beberapa anggota masyarakat lansia juga tetap aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan.

Karakteristik heterogen komunitas pesisir Tanjung Mas semakin menggambarkan keragaman yang ada di antara penerima manfaat program. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal seperti perikanan, buruh pelabuhan, perdagangan skala kecil, dan pekerjaan tidak tetap lainnya, yang membentuk dinamika sosial dan ekonomi komunitas. Maka dari itu, program Lawang Cemoro dirancang untuk mengakomodasi kondisi sosial yang beragam ini dengan mengembangkan kegiatan yang mencakup berbagai sektor, termasuk pengelolaan lingkungan, kesehatan masyarakat, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Melalui kegiatan terpadu ini, program ini berupaya tidak hanya untuk mengatasi masalah lingkungan tetapi juga untuk memperkuat ketahanan sosial dan meningkatkan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan.

Pertamina, melalui staf pengembangan masyarakat, menekankan bahwa program ini tidak membatasi partisipasi berdasarkan latar belakang sosial,

pendidikan, ekonomi, atau profesional. Sebaliknya, program ini mendorong keterlibatan komunitas yang luas untuk memastikan bahwa berbagai suara, pengalaman, dan perspektif terwakili dalam proses implementasi. Partisipasi inklusif ini menunjukkan bahwa program ini sengaja dirancang untuk menjangkau audiens yang heterogen dan untuk mengakui beragam kapasitas dan kontribusi anggota komunitas. Pendekatan seperti itu mencerminkan prinsip bahwa inisiatif pemberdayaan masyarakat harus responsif terhadap realitas sosial yang kompleks dari komunitas lokal.

Temuan ini sejalan dengan perspektif keragaman dalam konsep DEI. Menurut Tovar (2023, dalam Omar & Semhar, 2023) keragaman mencakup seluruh aspek perbedaan yang melekat pada individu maupun kelompok sosial, dan konsep DEI mendorong terciptanya lingkungan yang lebih representatif dan terbuka dalam berbagai aspek lingkungan sosial, sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Rosmalily (2023). Dalam konteks program pembangunan berbasis komunitas, pengakuan dan penerimaan keragaman sangat penting karena memungkinkan program untuk menanggapi berbagai kebutuhan, kapasitas, dan pengalaman anggota komunitas. Implementasi program Lawang Cemoro menunjukkan upaya untuk mengakui dan mengakomodasi keragaman

komunitas, yang pada akhirnya berkontribusi pada penguatan keberlanjutan dan inklusivitas inisiatif pemberdayaan komunitas. Meskipun jangkauan program telah mencakup berbagai elemen masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa akomodasi keberagaman masih didominasi oleh kelompok dengan kapasitas organisasional, seperti kader dan komunitas local. Kondisi ini menunjukkan bahwa representasi kelompok yang lebih marginal masih perlu diperluas agar prinsip diversity tidak hanya bersifat representatif tetapi juga transformatif.

Konsep Kesetaraan.

Hal ini terlihat melalui penyesuaian layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Implementasi program tidak membatasi partisipasi berdasarkan status sosial atau ekonomi, sehingga memungkinkan semua warga untuk terlibat dalam kegiatan dan mendapatkan manfaat dari intervensi program. Pendekatan personal yang diterapkan oleh relawan SAPA, JPPA, dan ASN Mengajar memastikan bahwa lansia, ibu hamil, anak-anak, dan warga dengan keterbatasan mobilitas terus menerima layanan kesehatan dan pendidikan. Relawan memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan layanan dan memfasilitasi akses bagi kelompok yang

mungkin menghadapi kesulitan dalam berpartisipasi dalam program masyarakat.

Selain partisipasi terbuka, program ini juga mengadopsi pendekatan afirmatif dengan memberikan dukungan yang ditargetkan untuk kelompok rentan dengan kebutuhan khusus. Ini termasuk ibu hamil yang berisiko mengalami kekurangan energi kronis (KEK), anak-anak dengan potensi kondisi stunting, korban kekerasan dalam rumah tangga, dan lansia yang membutuhkan bantuan dan pemantauan berkelanjutan. Berbagai bentuk dukungan diberikan untuk mengatasi kebutuhan ini, seperti program pemberian makanan tambahan, pendidikan kesehatan, bantuan psikososial, pendidikan pengasuhan anak, dan layanan konseling dengan rujukan ke lembaga terkait. Selain itu, semua layanan program mulai dari pendidikan kesehatan dan bantuan kasus hingga pelatihan lingkungan dan pembangunan kapasitas masyarakat disediakan secara gratis, sehingga mengurangi hambatan ekonomi yang sering dialami oleh rumah tangga berpenghasilan rendah.

Kolaborasi lintas sektor juga memperkuat orientasi kesetaraan program. Kemitraan antara relawan masyarakat, lembaga pemerintah daerah, petugas kesehatan, dan organisasi sosial memungkinkan implementasi pelatihan pencegahan dan program bantuan bagi

korban kekerasan dalam rumah tangga dan masalah sosial lainnya. Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa layanan tidak hanya mudah diakses tetapi juga responsif terhadap tantangan sosial kompleks yang dihadapi masyarakat. Praktik-praktik tersebut menekankan penerapan kesetaraan akses yang berorientasi pada kebutuhan dan masalah nyata penduduk setempat.

Secara konseptual, praktik-praktik ini konsisten dengan definisi kesetaraan yang dijelaskan oleh Vacca (2008, dalam Adeoye et al., 2024) bahwa kesetaraan menekankan distribusi kesempatan, dukungan, dan sumber daya yang adil tanpa memandang latar belakang individu. Kesetaraan dalam Program Lawang Cemoro juga mencerminkan pemahaman bahwa keadilan tidak selalu berarti perlakuan yang sama untuk semua orang, melainkan penyediaan dukungan dan sumber daya yang berbeda sesuai kebutuhan spesifik agar setiap individu dapat mencapai perkembangan yang optimal. Frederick dan Hemema (2019 dalam Mulyanti et al., 2024) menegaskan bahwa kesetaraan menekankan pada pemberian dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oleh karena itu, program ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat yang berorientasi pada kesetaraan melampaui sekadar menyediakan akses yang sama, hal ini juga melibatkan pengakuan terhadap ketidaksetaraan struktural dalam masyarakat

dan merancang intervensi yang responsif terhadap kesenjangan tersebut. Dalam hal ini, program Lawang Cemoro dapat dipahami tidak hanya inklusif secara administratif tetapi juga responsif secara substantif terhadap kerentanan sosial dan ekonomi yang dialami oleh anggota masyarakat. Pendekatan afirmatif yang diberikan menunjukkan adanya upaya untuk membuka kesetaraan akses. Namun, keberlanjutan dukungan bagi kelompok rentan masih bergantung pada peran relawan dan pihak perusahaan, sehingga diperlukan regulasi atau aturan formal agar program ini bisa berjalan jangka panjang.

Konsep Inklusi.

Konsep inklusi dalam pelaksanaan program diwujudkan melalui pembukaan ruang partisipasi bagi masyarakat melalui mekanisme komunikasi sistematis dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Dari perspektif interaksi sosial, inklusi membutuhkan penciptaan lingkungan yang mendukung, menghormati, dan mengakui keragaman sebagai kekuatan bersama, sebagaimana dikemukakan oleh Guo-Brennan (2021 dalam Adeoye et al., 2024). Dalam konteks keterlibatan masyarakat, lingkungan inklusif ini tercermin dalam keterlibatan aktif anggota masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan kolektif,

memungkinkan program dirancang berdasarkan kebutuhan dan aspirasi nyata penduduk setempat. Tahap perencanaan, misalnya, dilakukan melalui diskusi kelompok forum yang melibatkan masyarakat, lembaga pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Forum partisipatif ini berfungsi sebagai ruang dialog di mana penduduk dapat mengungkapkan perspektif mereka, mengidentifikasi isu-isu prioritas, dan memberikan rekomendasi mengenai pelaksanaan program. Hal ini dicontohkan oleh praktik kantor kecamatan yang mengadakan forum bulanan (setiap tanggal 25) untuk berkoordinasi dengan para pemimpin masyarakat, membahas program kebijakan pemerintah yang ada dan isu-isu yang memengaruhi warga. Hasil diskusi ini dikumpulkan dan digunakan sebagai referensi dalam perencanaan dan implementasi program, memastikan bahwa suara masyarakat terwakili dalam proses pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, anggota masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat program tetapi juga bertindak sebagai aktor kunci dalam mengimplementasikan berbagai kegiatan. Misalnya, kader atau relawan SAPA dan JPPA berfungsi sebagai perwakilan masyarakat yang menyampaikan kebutuhan warga, memberikan pendidikan tentang perlindungan perempuan dan anak, dan

melaporkan kasus-kasus yang membutuhkan bantuan. Kelompok Petani Perempuan juga aktif terlibat dalam menentukan jenis pelatihan lanjutan yang dibutuhkan untuk mendukung perekonomian melalui pertanian hidroponik. Inisiatif pendidikan juga didukung oleh keterlibatan masyarakat ASN Mengajar, yang berkontribusi pada kegiatan belajar anak-anak, sementara Yayasan Anantaka memberikan dukungan tambahan dalam memperkuat program pemberdayaan masyarakat. Partisipasi berbagai aktor ini menunjukkan sifat kolaboratif program tersebut dan mencerminkan pendekatan tata kelola partisipatif di mana berbagai pemangku kepentingan menyumbangkan pengetahuan, sumber daya, dan perspektif mereka untuk mendukung pembangunan masyarakat.

Berdasarkan dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat 2025 dari PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Semarang, 7 orang (28%) menyatakan bahwa masyarakat telah 'terlibat', sedangkan 18 orang (72%) mengaku 'sering terlibat' dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program (Fakhrudin, 2025). Temuan ini sejalan dengan interpretasi inklusi sebagai suatu kondisi di mana individu dan kelompok masyarakat merasa dihargai, terlibat, dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan sosial yang dijelaskan oleh Omar & Semhar (2023). Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan

konsep DEI dalam program keterlibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan efektivitas program tetapi juga memperkuat proses pemberdayaan masyarakat yang adil dan inklusif, di mana masyarakat lokal berperan aktif dalam membentuk dan mempertahankan inisiatif pembangunan. Meskipun tingkat partisipasi masyarakat tergolong tinggi, hal tersebut belum menjamin adanya kesetaraan pengaruh dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan kelompok rentan memiliki kapasitas yang sebanding dalam memengaruhi substansi dan arah kebijakan program.

Implementasi Dimensi Keterlibatan Masyarakat

Implementasi dimensi keterlibatan masyarakat dalam program TJSL “Lawang Cemoro” di Kelurahan Tanjung Mas telah mencerminkan keterlibatan masyarakat melalui dimensi konten (isi/pesan), sumber, dan proses. Pada dimensi konten, materi sosialisasi dan pelatihan disusun berdasarkan hasil pemetaan sosial, forum diskusi, serta kebutuhan yang diidentifikasi di tingkat masyarakat. Pada dimensi sumber, pelaksanaan program melibatkan aktor yang beragam, mulai dari perusahaan, lembaga mitra, aparat kelurahan, komunitas relawan, hingga kelompok masyarakat lokal. Adapun pada dimensi proses, program

dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, koordinasi lintas lembaga, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan praktik yang menempatkan aspirasi, kebutuhan, perhatian, dan nilai-nilai masyarakat ke dalam seluruh tahapan program, mulai dari perumusan, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Boyle et al., 2025).

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat lokal menjadi unsur penting karena masyarakat diposisikan sebagai pihak yang terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan di lingkungan mereka. Keterlibatan tersebut dapat diwujudkan melalui kontribusi tenaga fisik, pemikiran, partisipasi, maupun dukungan material yang pada akhirnya mampu memperkuat rasa kebersamaan serta rasa memiliki terhadap proses dan hasil pembangunan yang dijalankan (Satriya1 et al., 2021).

Dimensi Konten (Isi/Pesan)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi atau pesan dalam Program Lawang Cemoro dirancang agar faktual, konsisten, dan memiliki makna sosial yang nyata bagi masyarakat Kecamatan Tanjung Mas, sesuai dengan pernyataan Johnston & Lane (2019). Dalam konteks keterlibatan masyarakat, dimensi isi mengacu pada substansi pesan dan

nilai-nilai sosial yang tertanam dalam kegiatan program, yang bertujuan tidak hanya untuk menyebarkan informasi tetapi juga untuk mendorong kesadaran sosial, pemberdayaan, dan perubahan perilaku dalam masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa Program Lawang Cemoro membahas berbagai isu sosial yang relevan dengan konteks lokal, termasuk kemiskinan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, stunting, pengelolaan lingkungan, dan akses pendidikan, yang umum dihadapi oleh masyarakat di Tanjung Mas. Materi yang disampaikan selama kegiatan sosialisasi dan pelatihan, seperti pencegahan stunting, pendidikan gizi ibu dan anak, bantuan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan perempuan dan anak, dan pengelolaan lingkungan melalui hidroponik, penyaringan air, dan inisiatif bank sampah, dikembangkan berdasarkan hasil pemetaan sosial, diskusi masyarakat, dan identifikasi langsung kebutuhan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan berbagai mitra, termasuk Yayasan Anantaka, ASN Mengajar, dan kelompok masyarakat KWT Tunas Bahagia. Pendekatan partisipatif dalam merancang konten program ini memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan selaras dengan kondisi dan tantangan nyata yang dialami oleh masyarakat setempat. Selain itu, kehadiran komunitas ASN Mengajar semakin memperkuat dimensi pendidikan program

dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang berfokus pada penguatan kapasitas anak-anak melalui bimbingan yang lebih beragam terkait budaya, seni, pengetahuan sosial, kesadaran emosional, dan pembentukan karakter. Kegiatan-kegiatan ini memainkan peran penting dalam mendorong anak-anak untuk mengembangkan kreativitas, keterampilan sosial, dan berpikir kritis, sekaligus membantu mengurangi ketergantungan berlebihan pada perangkat digital dan meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Melalui pendekatan ini, program ini tidak hanya mendukung perkembangan akademis tetapi juga berkontribusi pada pembentukan nilai-nilai karakter positif di kalangan anak-anak di masyarakat.

Lebih lanjut, dalam kerangka Program Lawang Cemoro, penyediaan materi terkait kesehatan, ketahanan keluarga, dan lingkungan sosial juga berfungsi sebagai mekanisme peningkatan kapasitas bagi kader lokal, seperti anggota SAPA, JPPA, dan LSAPA. Kader-kader ini dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan mereka untuk bertindak sebagai pendidik, fasilitator, dan mentor masyarakat di lingkungan masing-masing. Dengan memperkuat peran aktor lokal, program ini mendorong kepemilikan dan keberlanjutan masyarakat, karena penyebaran informasi dan mekanisme dukungan dapat berlanjut

bahkan setelah keterlibatan langsung pemangku kepentingan eksternal. Konten tersebut tidak hanya disediakan sebagai formalitas program TJSL perusahaan, tetapi juga sebagai respons terhadap isu-isu sosial dan kebutuhan nyata yang dialami oleh masyarakat pesisir, termasuk kelompok rentan. Selain itu, program ini juga selaras dengan agenda pembangunan yang lebih luas, khususnya pembangunan berkelanjutan, termasuk tujuan yang terkait dengan pengurangan kemiskinan, kesehatan dan kesejahteraan yang baik, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat berkelanjutan.

Integrasi prioritas pembangunan ke dalam kegiatan program menunjukkan upaya agar inisiatif pemberdayaan masyarakat lokal turut berkontribusi pada kerangka pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Temuan ini sejalan dengan pandangan Johnston & Lane (2019) yang menekankan bahwa konten dalam keterlibatan masyarakat harus autentik, menunjukkan niat baik, dan memiliki integritas moral untuk membangun kepercayaan publik. Keragaman konten ini juga menunjukkan bahwa program tidak bersifat tunggal, melainkan multi-sektoral. Dengan demikian, program ini selaras dengan prinsip keterlibatan masyarakat, yakni bahwa pesan harus relevan, mudah dipahami, serta mampu mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.

Dimensi Proses

Johnston & Lane (2019) menjelaskan bahwa dimensi proses dalam Program Lawang Cemoro menunjukkan praktik keterlibatan masyarakat yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada tindak lanjut. Proses implementasi menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan, koordinasi, dan evaluasi dilakukan secara sistematis, partisipatif, dan terbuka. Proses dimulai dengan kegiatan pemetaan sosial yang bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi, potensi lokal, dan kebutuhan prioritas masyarakat. Tahap awal ini berfungsi sebagai dasar berbasis bukti untuk desain program, memastikan bahwa inisiatif yang diimplementasikan selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Semarang, sebagai pelaksana program TJSL telah mengembangkan rencana strategis dan rencana kerja setelah melakukan diskusi kelompok forum yang melibatkan masyarakat, pemerintah, kelompok masyarakat, dan mitra profesional untuk memungkinkan berbagai perspektif dan aspirasi masyarakat diartikulasikan dan diintegrasikan ke dalam prioritas program. Selain itu, informasi program dikomunikasikan secara terbuka melalui berbagai saluran, termasuk pertemuan masyarakat, forum lokal, media massa, dan platform media sosial. Saluran komunikasi ini

memungkinkan anggota masyarakat tidak hanya menerima informasi tetapi juga memberikan umpan balik, menyampaikan kekhawatiran, dan memberikan ide mengenai implementasi program. Praktik ini mencerminkan dimensi proses yang diuraikan dalam literatur tentang keterlibatan masyarakat, yang menekankan transparansi, kepercayaan, legitimasi, keberadaan saluran komunikasi, dan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat (Johnston & Lane, 2019).

Proses ini dilakukan melalui koordinasi antarlembaga secara berkala, baik dalam bentuk pertemuan tatap muka maupun komunikasi digital, diikuti dengan pemantauan dan evaluasi berkala. Pertamina mengadakan pertemuan koordinasi dan evaluasi setiap empat bulan. Interaksi berkala ini membantu menjaga transparansi, membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan, dan memastikan bahwa kegiatan program tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses pemantauan dan evaluasi akan menghasilkan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk membantu mengukur dampak sosial dan penilaian pengembalian investasi sosial yang dilakukan setiap tahun oleh Pertamina untuk menilai efektivitas dan keberlanjutan program.

Dengan memastikan bahwa semua masukan, pandangan yang berbeda, dan kebutuhan komunitas yang unik dicatat dan

dipertimbangkan secara adil, program Lawang Cemoro menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas melampaui interaksi atau konsultasi sederhana. Sebaliknya, keterlibatan diinstitusionalisasikan melalui perencanaan kolaboratif, dialog berkelanjutan, dan proses evaluasi bersama yang mengarah pada peningkatan program yang konkret. Pendekatan partisipatif dan responsif ini menunjukkan bahwa keterlibatan tidak hanya terjadi pada tahap implementasi, tetapi berlangsung sepanjang siklus program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Tjilen (2023 dalam Judijanto & Muhtadi, 2024) yang menekankan bahwa implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) harus berangkat dari kebutuhan komunitas.. Melalui keterlibatan yang berorientasi pada proses ini, perusahaan dapat memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan legitimasi organisasi, dan menciptakan nilai bersama bagi perusahaan dan komunitas.

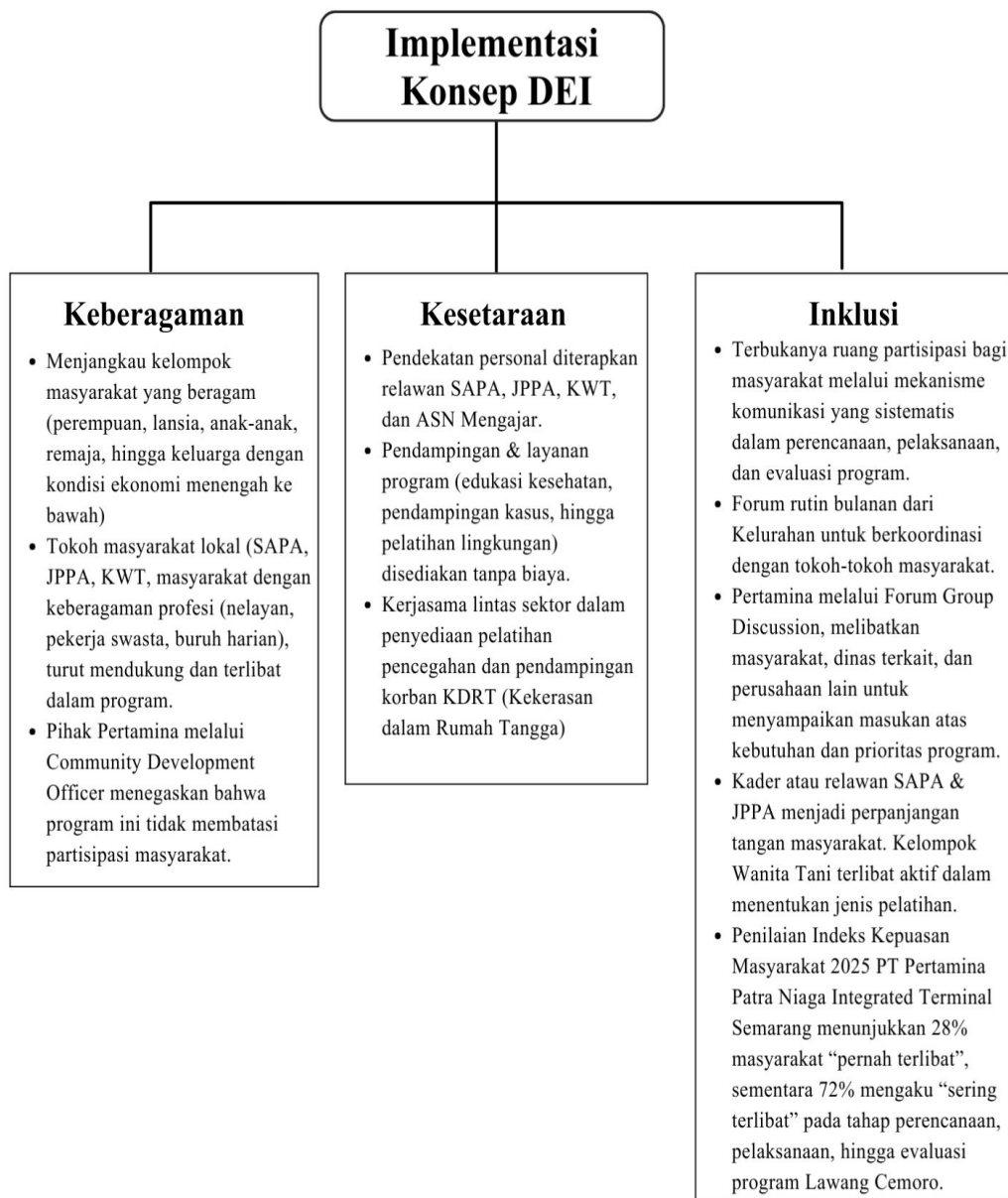
Dimensi Sumber

Dari segi sumber daya atau manusia, program Lawang Cemoro diimplementasikan melalui kolaborasi multi-pemangku kepentingan, dengan Pertamina sebagai fasilitator utama dalam pelaksanaan program TJSL bekerja sama dengan Yayasan Anantaka sebagai penyedia layanan psikososial, ASN

Mengajar sebagai mitra pendidikan yang mendukung kegiatan pembelajaran berbasis masyarakat. Selain itu, pejabat desa dan kepala lingkungan (RT/RW) memainkan peran strategis sebagai perwakilan dan penghubung langsung antara masyarakat dan perusahaan atau lembaga pendukung. Program ini juga melibatkan berbagai kelompok masyarakat seperti relawan SAPA, relawan JPPA, kader PKK, kelompok tani perempuan (KWT), dan perwakilan masyarakat setempat lainnya yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan program. Relawan SAPA dan JPPA secara khusus menjalankan fungsi seperti menerima laporan, melakukan penilaian awal, memberikan bantuan, dan merujuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada pihak berwenang yang relevan jika diperlukan. Sementara itu, KWT bertindak sebagai penggerak inisiatif lingkungan, termasuk kebun masyarakat, pengelolaan rumah kaca, dan program pengelolaan sampah yang bertujuan untuk memperkuat kesadaran lingkungan dan ketahanan ekonomi masyarakat.

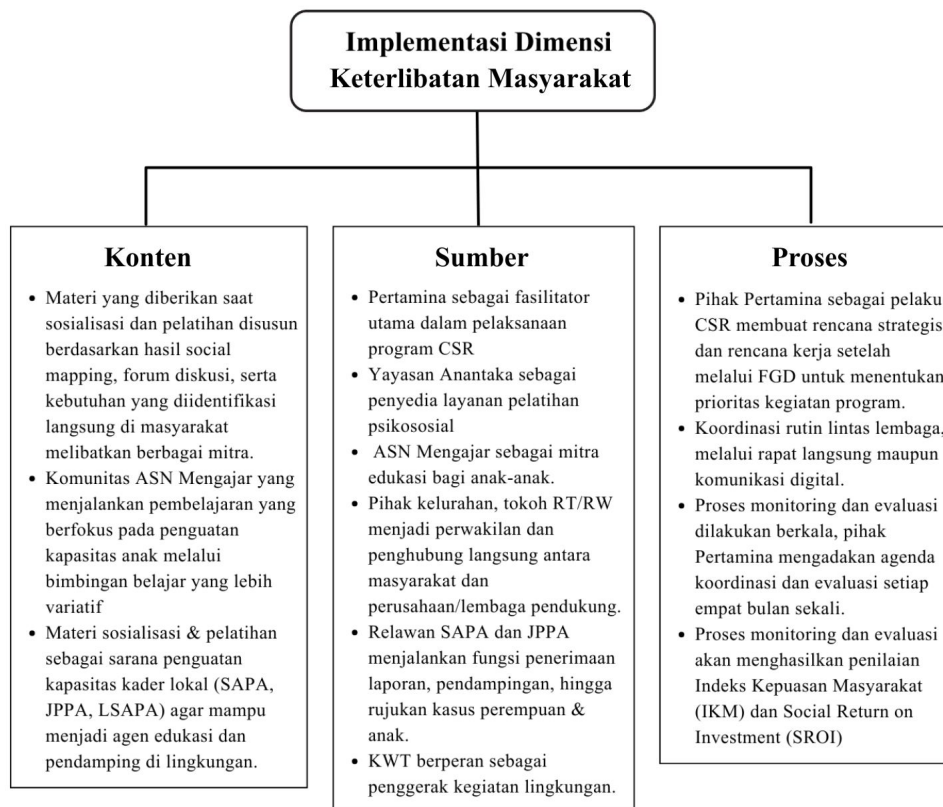
Keterlibatan berbagai aktor ini memungkinkan kolaborasi lintas sektor yang mengintegrasikan peran korporasi, pemerintah daerah, organisasi masyarakat

sipil, dan anggota masyarakat dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi tersebut juga memastikan bahwa program tersebut mencerminkan kebutuhan dan perspektif lokal, karena perwakilan masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam implementasi program dan proses pengambilan keputusan. Konsistensi antara pernyataan, komitmen, dan tindakan aktor program memperkuat kepercayaan publik terhadap keberadaan program. Kondisi ini menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan representasi dalam keterlibatan masyarakat sesuai dengan dimensi sumber yang dijelaskan oleh Johnston & Lane (2019). Partisipasi aktif ini mencerminkan bahwa masyarakat tidak diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai sumber daya berharga yang memberikan pengetahuan, pengalaman, dan jaringan sosial kepada program tersebut. Keterlibatan multi-aktor ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat yang efektif membutuhkan partisipasi yang bermakna dari para pemangku kepentingan lokal untuk memastikan keberlanjutan program, memperkuat kepemilikan masyarakat, dan meningkatkan dampak sosial jangka panjang dari inisiatif pemberdayaan berbasis masyarakat.



Gambar 1. Implementasi konsep DEI

Sumber: Gusma, 2026



Gambar 2. Implementasi Dimensi Keterlibatan Masyarakat

Sumber: Gusma, 2026

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Lawang Cemoro yang dilaksanakan oleh PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Semarang merupakan praktik keterlibatan masyarakat berbasis konsep DEI yang efektif dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Mas. Penerapan prinsip keberagaman, kesetaraan, dan inklusi terbukti memperluas partisipasi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah, sehingga masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat,

tetapi juga sebagai subjek yang berperan dalam proses perubahan sosial. Efektivitas program ini didukung oleh penerapan dimensi keterlibatan masyarakat yang meliputi konten, proses, dan sumber. Dimensi konten tercermin pada penyusunan program yang didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat, dimensi proses tampak pada pelaksanaan program yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan, sedangkan dimensi sumber terlihat melalui kolaborasi multipemangku kepentingan yang melibatkan perusahaan, pemerintah lokal, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan relawan. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi prinsip DEI

dalam program tanggung jawab sosial perusahaan berkontribusi pada terciptanya pemberdayaan masyarakat yang lebih inklusif sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama pada aspek kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan inklusi sosial. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa DEI dapat digunakan sebagai kerangka analitis untuk memahami efektivitas keterlibatan masyarakat dalam program CSR yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat terutama kelompok rentan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ke depan diarahkan pada penguatan pendampingan jangka panjang, perluasan ruang partisipasi kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan, serta pengembangan mekanisme evaluasi partisipatif agar keberlanjutan dan dampak sosial program dapat terukur secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Adeoye, M. A., Akinnubi, O. P., & Jimoh, H. A. (2024). Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi sebagai Alat Penting dalam Mempromosikan Pengajaran dan Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Kebutuhan Khusus Indonesia*, 4.

Ali, Primayani, F. D., & Putri M. R. (2025). Problematika Ketimpangan Sosial di Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan Yang Solutif. *Legal System Journal*, 2, 14–19. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3554>

Alwi, A., & Mutmainnah, N. (2025). Dampak Kesenjangan Sosial dan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Makassar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9, 10602–10610.

Boyle, E., Revez, A., Duffy, G., Farrell, A., Deane, A., Ó Gallachóir, B., & Wittmayer, J. M. (2025). Public participation in the development of electricity grid infrastructure: Early engagements and community forums. *Energy Research and Social Science*, 120. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2024.103878>

Database Peraturan BPK RI. (2007, August 16). *Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Peraturan.Bpk.Go.Id. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965>

Fakhruddin, R. (2025). *Laporan Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Semarang Tahun 2025*.

- Fauziah, A., Primafira, A., Tahir, M. I., Andayani, Q., Fachri, A., Sumartono, E., Ketut Budaraga, I., Heryadi, D. Y., Kurniasih, S., & Pakpahan, H. T. (2024). *Konsep Pemberdayaan Masyarakat* (R. Hidayanti, Ed.). CV Hei Publishing Indonesia. www.HeiPublishing.id
- Fransisca, G., & Juliadi, R. (2024). CSR Communication Strategies of Adira Finance to Increase the Corporate Reputation. *Jurnal Audience*, 7, 31.
- Gunawan, I., Setyoko, P. I., & Tobirin, T. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan an Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di kabupaten Banyumas. *Public Policy And Management Inquiry*, 7(2023), 722–734.
- Gusma, C. C. (2026). *Implementation of the DEI Concept*. Universitas Dian Nuswantoro.
- Indrayani, H., Satriya, C. Y., Zulfiningrum, R., & Siregar, N. I. (2025). *Buku Praktik Terbaik Program Public Relation* (A. Wikan, Ed.; 1st ed.). PT Media Piar Indonesia.
- Johnston, K. A., & Lane, A. B. (2019). An authenticity matrix for community engagement. *Public Relations Review*, 45(4). <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2019.101811>
- Judijanto, L., & Muhtadi, M. A. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Berkelanjutan, Inovasi Ramah Lingkungan, dan Keterlibatan Masyarakat terhadap Keberhasilan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Sumatera. In *Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science* (Vol. 3, Number 02).
- Mulyanti, R., Rony, Z. T., & Ali, H. (2024). The Impact of Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) Initiatives on Employee Performance. *Dinasti International Journal of Digital Business and Management*, 5. <https://doi.org/10.38035/dijdbm.v5i4>
- Novrianzah, M. R., & Andrias, M. S. (2025). Implementasi Kebijakan Diversity, Equity, and Inclusion di Industri Teknologi. *Jurnal Doktor Manajemen*, 8(2). <https://doi.org/10.22441/jdm.v8i2.33660>
- Omar, K., & Semhar, W. (2023). *Dampak Keberagaman Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Upaya Ekuitas dan Inklusi pada Citra Merek*. Sekolah Bisnis, Masyarakat, dan teknik Universitas Malardalen.
- Pharmacista, G. (2023). Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) as an Embodiment of Corporate Environmental Social Responsibility in the Era of Globalization. *Sean Institute*, 13, 728–729.

- <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/InfoSains>
- Rahmawati, S., & Andriani, S. (2023). Strategi Komunikasi Public Relations Dalam Membangun Citra Perusahaan Summertime Melalui Perubahan Kemasan Ramah Lingkungan. *Jurnal Audience*, 6, 243.
- Rosmalily. (2023). Memikirkan Kembali Strategi Pengajaran: Pertimbangan untuk Mempromosikan Keadilan, Keberagaman dan Inklusi. *Jurnal Internasional Manajemen Pendidikan Dan Sosiologi*, 2, 231244.
- Sari, N. J., Rahmanda, E., Yena, F., Putri, S. T., & Laksana, A. (2024). Komunikasi Korporasi Pada Era Society 5.0. *ETIC (Education and Social Science Journal)*, 1(2).
<https://naluriedukasi.com/index.php/eticjournal/index>
- Satriya¹, C. Y., Indrayani², H., Agustia³, M., & Putri, A. (2021). Membedah Strategi Komunikasi Pemberdayaan Pasar Papringan Melalui Digital Place Storytelling. *Dynamic Media, Communications, and Culture*, 2.
- Sidik, B., & Nabilah. (2024). Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Lintasarta dalam pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2.
- Suryanto, M. Z. A., & Suaib, N. R. (2024). STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIC RELATION SAMPAIJA.UH.COM DALAM CAMPAIGN 1000 SEPATU ALAS TEMPUH. *Mediakom: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 16–33.
<https://doi.org/10.35760/mkm.2024.v8i1.11028>
- Tufani, J. A. (2024). Stakeholder perspectives on mosque management and accountability: A stakeholder theory approach. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 3, 386.
- Yurmaini, Erliyanti, Sundari, D., & Anshari, K. (2024). Pendekatan Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Hibrid Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, 6(1).